

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Pangerang Moenta, *Permusyawaratan dan DPRD (Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan)*, Inteligencia Media, Malang, 2016.
- Achmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2013.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2005.
- Anwar C. *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Rajawali, Malang, 2008.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui Pelayanan Public*. UGM Press. Yogyakarta, 2006, hal.
- Haris, Syamsuddin. *Proses Pencalonan Legislatif Lokal: Pola, Kecenderungan, dan Profil Caleg*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Huntington, Samuel. P. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2002.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H. Faried Ali dan Nurlina Muhidin, *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan otonom*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni, Jakarta, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. SinarGrafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta 2006.
- Miriam Budiardjo & Ibrahim Ambong (edit). 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, The University of Michigan, 1993.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Marwati Riza.. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri*. As Publishing. Makassar. 2009.
- Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara (sebuah konstruksi ideal negara hukum)*, Setara Press, Malang, 2016.
- MunirFuady. *Teori Negara Hukum Modern*.RefikaAditama. Bandung. 2009.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 2010.
- Romi Librayanto, *Ilmu Negara (Suatu Pengantar)*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006.
- Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

- Sidharta. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jakarta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Bandung, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta, Bandung, 2016.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, RinekaCipta, Jakarta, 2010.
- Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Toni Andrianus Pito, Efriza, Kemal Fasyah. “*Mengenal Teori-Teori Politik*”. Bandung. Penerbit Nuansa. 2006.

Jurnal

- AM Nggoro, *Makna Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum (Telaah Yuridis Metril dan Formil)*, Jurnal Hukum Sehasen, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- A Kenap, *Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Lex Administrasi, Volume 9, Nomor 3, 2021.
- A Abdillah, R Novianto, *Lembaga Quasi Non Governmental Organization (Quango) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: MUI*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 49, Nomor 1, 2019.
- BA Utama, *TSP Usanti, Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, Nomor 1, 2018.

- E Yulistyowati et.al., *Penerapan Konsep TriasPolitica Dalam SistemPemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang- Undang Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 2, 2016.
- I Aris, *Keududukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori The New Separation of Power (Kritik Atas Putusan MK Nomor 36/PPU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017*, Jurnal Jursiprudentie, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Muh.Hasrul dan Syafaat Anugrah Pradana. *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintahan Daerah*. Jurnal AmannaGappa, Volume 27 Nomor 1. 2019.
- MSF Samson et.al., *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Peraturan daerah Inisiatif di Kota Tidore Kepulauan*, Jurnal Eksekutif, Volume 3, Nomor 3, 2019.
- MY al Arif, *Aktualisasi Paham Konstitusionalisme dalam Konstitusi Pasca Amandemen UUD NKRI 1945*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 2017.
- N Nasution. *Analisis Hukum Pelanggarran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Abdi Ilmu, Volume 14, Nomor 1 Juni 2021.
- PED Antari, *Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial DI Indonesia*, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- SN Annisa, *Konsep Independensi Kejaksaan republik Indonesia Dalam Perpektif Teori The New Separation of Power bruce Ackerman*, Journal Of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 2, 2021
- W Gusmansyah. *Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Volume 2 Nomor 2, 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 41 UU 32/2004, Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 343 ayat (1) UU 27/2009 .

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia .2010. Panduan Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan

Urutan Bab, Pasal Dan Ayat). Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta. hal. 46.

INTERNET

<https://nasional.kompas.com>, Survei LSI: Banyak Pemeilih tak kenal SosokCaleg di dapilnya, (diakses tgl 27 februari 2022 pukul 22:07)

<https://www.mkri.id/KKPU/SK290Thn2018>, Salinan KPU: Penetapan Pemilihan dan Alokasi Kursi anggota DPRD kab/kota di provinsi Sulawesi Selatan. Lampiran 1.23 (Diakses pada tanggal 27 februari 2022 pukul 23:00)

<https://makassar.tirbunnews.com /15/05/2019>, Abdul Aziz, Nasdem Ketua, Demokrat, PDIP dan Golkar Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Diakses pada tanggal 27 Februari 2022

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6008458/akd-dprd-makassar-2019-2024-berubah-ini-susunan-ketua-komisi-dan-anggotanya>, Ibnu Munsir "AKD DPRD Makassar 2019-2024 Berubah, Ini Susunan Ketua Komisi dan Anggotanya", Diakses pada tanggal 18 September 2022

DOKUMENTASI PENELITIAN



2. Bersama Bagian Humas DPRD Kota Makassar

